

STRATEGI KAMPAR MENUJU SERAMBI MAKKAH MELALUI “TALI BAPILIN TIGO”

Tim Peneliti:

**Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum
Mashuri, MA**

**Dr. H. Johar Arifin, Lc., MA
Muhammad Yasir, MA
Masyhuri, S.Psi., M.Psi**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2020



UIN SUSKA RIAU

Alamat: Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Web: lppm.uin-suska.ac.id Email: lppm@uin-suska.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

البحوث والخدمة المجتمعية

INSTITUTE FOR RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE

PENGESAHAN

Nomor: 0011 /Un.04/L.I /TL.01/ I/2021

Judul : Strategi Kabupaten Kampar Menuju Kota Serambi Mekah
Ketua : Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum
Anggota : Mashuri, MA
Dr. Johar Arifin, Lc, MA
Muhammad Yasir, S.Th.I, MA
Masyhuri, S.Psi.,M.Si
Fakultas/Unit : Ushuluddin
Jenis Penelitian : Mandiri Kelompok
Lokasi : Kampar
Waktu : Bulan Agustus s/d Desember Tahun 2020

Telah diseminarkan pada
Hari/Tanggal: Selasa, 12 Januari 2021

Narasumber

Prof. Dr. M. Arrafie Abduh, M.Ag

Narasumber

Dr. Hasbullah, M.Si

Ketua Peneliti

Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum

Mengetahui:
Ketua LPPM



Prof. Dr. M. Arrafie Abduh, M.Ag.
NIP. 196408271991031009

**STRATEGI KAMPAR MENUJU SERAMBI MAKKAH
MELALUI “TALI BAPILIN TIGO”**



Tim Peneliti:

**Afriadi Putra, S.Th.I., M. Hum
Mashuri, MA
Dr. H. Johar Arifin, Lc., MA
Muhammad Yasir, MA
Masyhuri, S.Psi., M.Psi**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2020

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **”Strategi Kampar Menuju Serambi Makkah Melalui Tali Bapilin Tigo”**. Sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari Pemerintah Daerah, Tokoh Adat, Ulama dan masyarakat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Harapan penulis semoga penelitian ini dapat berguna bagi tim penulis khususnya kemudian masyarakat Kabupaten Kampar dan civitas akademik pada umumnya. Akhir kata penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan dan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb

Bangkinang, 07 Desember 2020

Peneliti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah.....	5
C Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A Kajian Teoritis	6
B Penelitian yang Relevan.....	11
BAB III METODE PENELITIAN	
A Pendekatan Penelitian.....	13
B Latar dan Setting Penelitian	13
C Subjek dan Informan Penelitian	14
D Metode Pengumpulan Data	15
E Teknik Analisis Data	15
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A Strategi Mewujudkan Kampar Serambi Makkah	19
B Konsep Tali Bapilin Tigo.....	24
BAB V PENUTUP	
A Kesimpulan.....	29
B Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundangan mengatur kehidupan warga negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bermasyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga untuk mencapai hal tersebut maka perlu adanya elemen-elemen yang berhubungan atau berdampingan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan Kabupaten Kampar periode 2017-2022 memiliki visi terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri dan pertanian yang maju dengan masyarakat yang religius, beradat, berbudaya dan sejahtera serta memiliki 6 misi untuk mewujudkan visi tersebut yaitu pada misi yang ke-6 yaitu “Memperkuat citra Kampar sebagai serambi Makkah Riau yang religius, beradat dan berbudaya”. Untuk itu maka diperlukan elemen-elemen yang bisa mewujudkan visi dan misi ini.

Agama Islam masuk ke Kabupaten Kampar pada abad ke-8 melalui Khalifah Muawiyah melalui perdagangan untuk menanamkan pengaruh ekonomi dan agama di di Desa Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Kuntu Darussalam di masa lalu merupakan daerah strategis pada perjalanan sungai maupun darat, daerah subur penghasil lada, rempah-rempah dan hasil hutan. Sejarah menyebutkan bahwa Kabupaten Kampar yang dibangun dengan dasar kehidupan beradat dan beragama untuk mensejahterakan masyarakat.

Pemimpin dan kepemimpinan sejatinya telah lahir semenjak adanya kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Keberadaan seorang pemimpin tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan merupakan sesuatu yang harus ada mulai dari kelompok yang terkecil sampai kelompok masyarakat yang terbesar seperti pemimpin sebuah negara. Problematika dan dinamika kehidupan masyarakat saat ini membutuhkan satu arah untuk mengantar masyarakat dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Pada Kabupaten Kampar terkenal dengan Tali Bapilin Tigo yang memiliki makna pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama tetap kuat dipegang teguh oleh masyarakat yang sesuai dengan pandangan kehidupan bahwa nilai dan jati diri

masyarakat Kampar yang mengakui pentingnya musyawarah dan kerja sama. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tokoh adat atau ninik mamak bertugas mengontrol masyarakat dan kemenakan dengan petuah, nasehat dan hukum adat di suatu daerah dan saat sekarang ini terdapat 514 ninik mamak yang tersebar di Kabupaten Kampar. Lebih lanjut, bagi masyarakat Kabupaten Kampar nilai-nilai agama dan adat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, seperti ungkapan adat mengatakan “Adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan kitabullah”.

Ulama merupakan pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Ulama menjadi elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan memahami ilmu agama secara mendalam sehingga menjadi rujukan masyarakat untuk bertanya berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan. Ulama juga merupakan sosok yang memahami perkembangan keadaan atau zaman dan juga memahami perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam berbagai macam aspek. Lebih lanjut, ulama memiliki integritas dan pribadi yang kuat serta menjadi panutan masyarakat. Jadi masyarakat bukan sekedar melihat pada ilmunya ulama tetapi melihat pada opini, pendapat, akhlak dan keseharian kehidupan ulama.

Sinergi berarti kegiatan, hubungan, kerjasama atau operasi gabungan diartikan juga disini Sinergitas adalah kerjasama unsur atau bagian atau fungsi atau instansi atau lembaga yang menghasilkan suatu tujuan lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri. Sinergitas dalam capaian hasil berarti kerjasama berbagai unsur atau bagian atau kelompok atau fungsi atau instansi atau lembaga untuk mendapat capaian hasil yang lebih baik dan lebih besar. Banyak yang di hasilkan dari bersinergi diantaranya adalah terciptanya saling menghargai dan

pelaksanaan tugas atau kewajiban menjadi lebih maksimal dan efisien. Lebih lanjut, sinergitas ini dibutuhkan oleh Kabupaten Kampar dikarenakan Kabupaten Kampar meyakini bahwa peran ulama, tokoh adat dan pemerintah diharapkan mampu menjalankan kehidupan masyarakat Kampar yang lebih baik dan mempercepat pembangunan daerah, menghidupkan kembali nilai – nilai budaya masyarakat masa lalu yang agamis serta sesuai dengan keinginan bersama-sama bersinergi menuju masyarakat yang sejahtera serta perlunya kebijakan publik untuk sinergitas antara pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama di Kabupaten Kampar. Adapun ruang lingkup kebijakan publik berupa kelembagaan, kewenangan, peran dan pendanaan bisa ditinjau dari aspek pendidikan, ekonomi, infrastruktur serta sosial budaya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, agama harus ada dalam system pendidikan dikarenakan agama berkaitan dengan keyakinan dasar setiap individu dalam sebuah masyarakat, yang kemudian menjadi komponen dominan yang mempengaruhi gerak langkah yang dilakukan oleh setiap individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut.

Pemerintah Negara Indonesia memandang bahwa pendidikan agama dan keagamaan penting untuk diatur lebih lanjut, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang dalam konsiderannya menyertakan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2727). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah negara Indonesia selain memandang bahwa agama itu penting

sehingga setiap peserta didik di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan harus mendapatkan pendidikan agama, pemerintah negara Indonesia juga menyadari akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penodaan agama.

Sejak lahir manusia menyandang sifat labil yang terkandung potensi dinamis, tetapi jika tidak mendapat binaan secara tepat justru bisa merusak kehidupan. Di balik kelabilan itu terlihat jelas bahwa pendidikan menjadi tuntutan kodrat manusia. Manusia siapapun, di manapun berada, sampai kapanpun wajib berpendidikan di dalam menghadapi setiap perikehidupannya (Suhartono, 2013). Dari sisi pendidikan, dalam kehidupan bermasyarakat terkandung sistem interaksi menyatukan dalam bentuk saling didik -mendidik antara pihak yang satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Di balik fakta itu, ada keberagaman potensi individual. Seseorang yang lebih menguasai bidang tertentu wajib mendidik yang lain dan sebaliknya ia harus siap untuk mendapat didikan orang lain yang lebih menguasai bidang yang berbeda.

Kegiatan ekonomi yang harus dijalankan adalah aspek ekonomi syariah karena memecahkan masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai islam. Syari'at Islam melarang individu untuk mengembangkan kepemilikannya dengan cara-cara tertentu misalnya perjudian, riba, penipuan, penipuan dalam jual beli, monopoli dan pematokan harga. Aspek infrastruktur yang dimaksud bertujuan untuk memperkuat nuansa islami sebagai identitas suatu kawasan.

Nilai sosial menjadi pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi sedangkan nilai budaya namun sejatinya apabila masyarakat memegang kuat nilai-nilai luhur budaya yang diwariskan turun-temurun akan membuat kondisi adat budaya masyarakat tidak seperti sekarang ini yang semakin tergerus oleh modernisasi dan globalisasi, yang ditandai dengan merasuknya paham individualis dan keserakahan sehingga menghilangkan sifat komunalisme serta kehidupan sederhana. Pada saat sekarang ini bahwa adat istiadat saat ini sudah menjadi barang langka yang hanya dikenal dan dimengerti oleh sekelompok orang saja atau orang-orang tua kita. Keberlangsungan adat istiadat yang harus dikatehui oleh generasi muda melalui tokoh adat yang menjadi suri tauladan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya sinegritas antara 3 elemen yang mampu memperkuat citra Kampar Serambi Makkah (KSM) yang merupakan gelar yang penuh bernuansa keagamaan, keimanan dan ketaqwaan. Penelitian ini akan menfokuskan kajian pada “Strategi Kampar Menuju Serambi Makkah Melalui Tali Bapilin Tigo”

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup empat pokok masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi mewujudkan “Kampar Serambi Makkah”?
2. Bagaimana konsep “Tali Bapilin Tigo” dalam mewujudkan Kampar Serambi Makkah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Memaparkan tentang strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Kampar untuk mewujudkan Kampar Serambi Makkah
- B. Menjelaskan konsep Tali Bapilin Tigo dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan Kampar Serambi Makkah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

Teoritis adalah sebuah bentuk dari buah pemikiran dan juga pola pikir yang dimana kemudian akan mendasarkan sebuah bentuk dari hal yang dimana semuanya akan berasal dari berbagai macam bentuk dari teori yang ada sebagai sebuah bentuk dari landasan untuk melakukan sebuah dan suatu hal. Berikut merupakan kajian teoritis tentang sinergitas, pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama di Kabupaten Kampar.

1. Sinergitas, Pemerintah Daerah, Tokoh Adat dan Ulama

Sinergitas atau sinergi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Sinergy* yang diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan operasi gabungan. Sinergitas atau sinergi merupakan hal yang sama, istilah sinergi diartikan sebagai kegiatan kelompok ataupun individu-individu yang berbeda latar belakang untuk menyesuaikan kinerja agar mencapai tujuan. Kegiatan sinergi merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan tersebut akan beriringan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Lebih lanjut, pada tulisan Hayati (2014) sinergi merupakan suatu kerjasama yang dapat terwujud ketika kita bisa mensinkronkan bermacam alternatif keinginan dengan cara komunikasi yang baik antar anggota serta dalam bersinerg, kita juga harus berkoordinasi satu sama lain sehingga terwujudnya suatu kegiatan yang efisien antar anggota tim.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pada UU. No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan masyarakat adat di suatu wilayah. Lebih lanjut, ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan, keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT.

Peran Pemerintah daerah dalam membangun masyarakat Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berlandaskan kepada Iman dan Takwa (IMTAK) kepada Allah SWT
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan agamis
3. Meningkatkan infrastruktur dan pemerataan pembangunan agar terciptanya akses bagi kehidupan masyarakat
4. Menciptakan lapangan pekerjaan
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kampar
6. Menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
7. Menjamin terciptanya kedamaian hidup umat beragama baik intern umat beragama, antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah

Selanjutnya peran tokoh adat dalam membangun masyarakat Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Membina anak kemenakan
2. Menyelesaikan konflik atau perkara antar anggota masyarakat adat
3. Mewakili negeri/masyarakat dalam acara adat istiadat
4. Melestarikan nilai-nilai adat atau budaya di masyarakat berupa bertutur kata, berpakaian, kegiatan adat pernikahan, aqiqah, khitan dan penobatan gelar adat.
5. Menjaga dan mengurus harta pusaka, tanah soko dan tanah ulayat agar mensejahterakan anak kemenakan dan masyarakat Kabupaten Kampar
6. Mendampingi / bermitra dengan pemerintah dalam proses pembangunan
7. Menyelamatkan negeri dari ancaman kerusakan moral sehingga terpelihara dan terjaga adat istiadat dan budaya

8. Memberikan contoh tauladan kepada anak kemenakan dan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya, akhlak mulia serta kepemimpinan
9. Mematuhi dan menjalankan aturan adat yang sudah disepakati bersama dan menjadi hukum yang tidak tertulis di masyarakat

Peran ulama dalam membangun masyarakat Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Melakukan dakwah islamiyah
2. Membina kader ulama
3. Memberikan fatwa, himbauan dan rekomendasi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat
4. Mengkaji dan mengembangkan Islam baik secara individu maupun kelembagaan atau organisasi masa
5. Melindungi agama Islam dan umat Islam dari ancaman langsung maupun tidak langsung seperti dekadensi moral dan kebudayaan barat
6. Menjadi tauladan bagi masyarakat dalam hal akhlak mulia, sopan santun dan kepemimpinan
7. Mendampingi dan bermitra dengan pemerintah dalam proses pembangunan

2. LAM (Lembaga Adat Melayu)

Lembaga Adat Melayu adalah sebuah lembaga adat daerah yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh Melayu Riau dari berbagai latar dan profesi yaitu pejabat pemerintahan, ulama, ilmuwan/cendekiawan dari perguruan tinggi di Riau, budayawan, seniman, sastrawan dan orang patut-patut yang berasal dari lingkungan kekuasaan tradisional Melayu Riau. Lembaga ini didirikan pada hari Sabtu, 1 Rabiul Akhir 1390 H atau 6 Juni 1970 M yang berlokasi di Pekanbaru, Provinsi Riau.

Lembaga Adat Melayu Riau memiliki program yaitu identitas berupa pelestarian (penggalian, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan) adat dan budaya Melayu Riau, baik yang bersifat bendawi maupun yang bukan bendawi, seperti senibina (arsitektur) Melayu, pakaian Melayu, huruf/tulisan Arab Melayu, upacara-upacara, seni, bahasa Melayu dan

keragaman dialeknya. Selanjutnya sebagai penanaman (internalisasi) nilai-nilai, norma dan adab Melayu Riau di lingkungan pendidikan dan ruang publik. Kemudian revitalisasi hukum dan aturan adat Melayu Riau di tengah-tengah masyarakat Riau yang beragam serta pemulihan hak-hak masyarakat adat Melayu Riau untuk kemaslahatan bersama.

Struktur organisasi LAM Riau terbagi menjadi tiga yaitu LAM Riau Provinsi dan LAM Riau Kabupaten/Kota yang terdiri dari kalangan:pemuka adat Melayu Riau yang bermastautin di ibukota Provinsi/Kabupaten & Kota serta para ulama, ilmunan, cendekiawan, budayawan, seniman dan orang patut-patut Melayu Riau. LAM Riau Kawasan/Rantau/Kenegerian/Kepenghuluan/Pebatinan yang berkedudukan di ibukota Kecamatan. Lebih lanjut, selanjutnya adalah LAM Riau Kenegerian/Kepenghuluan/Pebatinan/Desa dan/atau yang disebut dengan nama lainyang berkedudukan di Desa/Kepenghuluan. LAM Riau di tingkat ini biasanya disebut Lembaga Kerapatan Adat (LKA) dan diurus langsung oleh datuk-datuk/ninik mamak/batin setempat selaku pemilik anak kemenakan.

3. LAK (Lembaga Adat Kampar)

Kepengurusan Lembaga Adat Kampar (LAK) yang baru telah terbentuk sekitar bulan Februari, Bupati Kampar direncanakan akan melantik kepengurusan LAK periode 2016-2021. Ketua Lembaga Adat Kampar terpilih H. Sartunis Datuk Paduko Majo, sekretaris H. Syawir Datuk Tandiko dan Bendahara Drs. H. Sudirman Datuk Patio dan dibantu oleh pengurus yang lain.

Adapun program jangka pendek yang akan dilakukan LAK adalah mendata secara akurat para ninik mamak dengan cara menyurati ninik mamak negeri yang ada di wilayah Kabupaten Kampar. LAK juga akan berupaya untuk membina adat istiadat beserta hak dan tanah ulayat serta kekayaan adatnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dalam menjalankan program kerjanya, LAK akan bekerjasama dengan pemerintah, sebagaimana yang terdapat dalam pepatah adat, tali bapilin tigo, tungku tigo sajarongan demi terciptanya kesejahteraan bagi anak kemenakan

yang merupakan tujuan utama dari LAK dalam menjalankan program kerjanya

4. Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia

Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) yang didirikan pada tanggal 06 Januari 2015 merupakan wadah yang lahir dari kepedulian terhadap masyarakat adat yang mendiami negeri dari Sabang sampai Merauke dan dari Rote sampai Miangas sebelum Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, namun masih banyak yang hidup dibawah garis kemiskinan diatas tanah, air dan kekayaan hutan serta tambang ditengah keterbatasan modal dan teknologi walaupun selama ini upaya pemerintah Republik Indonesia mulai dari pusat sampai desa/kampung/kelurahan/nagari secara bertahap terus berjuang membangun dari sudut pandang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan baik secara fisik maupun non fisik.

Hal yang menjadi perhatian pendiri LEMTARI adalah bahwa didalam Struktur Pemerintahan Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai dengan HUT ke – 71 ini sangat jelas bahwa adat istiadat belum pernah diakomodir menjadi bagian dalam tata negara kita seperti kementerian, badan dan lembaga lainnya, yang ada hanya kebudayaan selama ini melekat dengan pendidikan atau pernah digabung dengan pariwisata, sedangkan adat istiadat belum pernah sama sekali, maka kami berpendapat bahwa lembaga masyarakat adat yang merupakan wadah penjelmaan dari masyarakat adat Indonesia yang telah hadir mengikuti jenjang pemerintahan di seluruh indonesia, namun untuk tingkat nasional belum ada, sehingga LEMTARI didirikan menjadi penyambung suara rakyat adat istiadat guna bermitra dengan pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif) maupun dengan dunia usaha dan komponen bangsa lainnya dalam ikut mempererat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara berdaulat yang juga diperjuangkan oleh tokoh dan masyarakat adat nusantara.

Terkait keberadaan LEMTARI sejak tanggal 06 Januari 2015 seperti disebutkan, maka LEMTARI sebagai organisasi perlu membuat laporan

kegiatan baik untuk konsumsi internal organisasi maupun untuk konsumsi pemerintah terkait yang isi laporannya tentang berbagai hal baik ditinjau dari aspek legalitas, kesekretariatan, kegiatan aksi, pengembangan organisasi sayap, pengembangan organisasi bawah (DPD, DPC, DPAC, DPRAN, Divisi Luar Negeri dan PBB serta Reposisi Personil DPP LEMTARI) sehingga baik secara internal maupun eksternal dapat diketahui keberadaan LEMTARI sebagai organisasi mandiri dan independen yang telah hadir menjadi bahagian dari komponen bangsa Indonesia sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan seluruh kegiatannya baik secara harian, mingguan, bulanan, triwulan dan semester serta tahunan.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang Serambi Makkah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Terutama yang berkaitan dengan daerah Aceh yang notabene dikenal dengan istilah negeri Serambi Makkah. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini yaitu;

Penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin Duhri yang berjudul “Aceh Serambi Makkah” yang menfokuskan penelitiannya tentang peran ibadah haji dalam pengembangan peradaban Aceh. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa sebutan Serambi Mekkah untuk Aceh tidak hanya dimulai sejak zaman Nuruddin Ar-Raniry, tetapi hingga saat ini, sebutan ini terus tidak lekang dalam memori dan penggunaan sehari-hari terhadap Aceh. Sebutan ini begitu membanggakan dan sekaligus menjadi sematan nama yang diterima khalayak sebagai pusaka warisan. Kejayaan Aceh masa lalu tidak dapat dilepaskan dari peran ibadah haji. Karena di Aceh menjadi pusat pembelajaran haji, maka Aceh disebutkan Serambi Mekkah. Karena ibadah haji, Aceh menjadi pusat ilmu pengetahuan, pengendalian usaha dakwah di Asia Tenggara, dan menjadikan Aceh sebagai daerah kosmopolitan yang mampu meramu berbagai budaya dan etnis menjadi peradaban baru, peradaban Islam.

Kemudian buku yang ditulis oleh Arskal Salim GP yang berjudul “Serambi Makkah yang Berubah”. Buku ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukannya hampir di seluruh wilayah Aceh. Buku ini

mewakili upaya orang muda dari Aceh sendiri untuk menjelaskan bagaimana Aceh menjawab tantangan zaman dengan bahasa dan langgam yang khas, serta menyiratkan elan vital dan daya tahan kesejarahan Aceh yang penuh gejolak dari zaman ke zaman. Para penulis buku ini berhasil menjelaskan perubahan paling mutakhir tentang peranan dan kegiatan tokoh-tokoh agama dari teungku dayah ke aktivis FPI. Buku ini menyoroti pula masalah jender dan kekuatan hukum di Aceh. Kaya analisis dan fakta yang menarik dan penting.

Adapun buku yang membahas tentang Kampar yang berkaitan dengan interaksinya dengan Islam, ditulis oleh M. Taufik Mandailing dengan judul “Islam Kampar; Harmoni Islam dan Tradisi Lokal”. Buku ini merupakan hasil penelitian disertasi (doktoralnya) di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2011. Menurut Taufik, dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat Kabupaten Kampar adalah masyarakat yang sangat identik dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam masyarakat adat Kabupaten Kampar ada semboyan “Adat Bersendi Syara’. Syara’ Bersendi Kitabullah”. Hal ini didukung oleh fakta sejarah yang menyatakan bahwa Kabupaten Kampar merupakan tanah peradaban yang sudah mengenal agama Islam sejak abad ke 13 masehi.

Analisa penelitian yang relevan di atas memberikan gambaran kepada penulis untuk melihat arti penting dari penelitian ini. Penelitian yang fokus membahas tentang strategi bagaimana mewujudkan Serambi Makkah belum penulis temukan, terlebih kajian tentang Tali Bapilin Tigo yang menjadi landasan filosofis masyarakat untuk membangun Kabupaten Kampar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan berusaha menggambarkan keadaan atau fenomena sosial. Menurut Lexy J Moleong yang mengutip pendapat Bogdan dan Taylor dinyatakan bahwa: “Metode kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Pendekatan ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

Pendekatan kualitatif mempunyai tujuan bahwa yang diteliti adalah sesuatu yang penting (esensial) dan digunakan latar alami sebagai sumber data langsung. Penelitian kualitatif mempunyai lima sifat atau karakteristik, yaitu: (1) latar alami; (2) deskriptif; (3) penonjolan proses; (4) analisis induksi, dan (5) pengungkapan makna.

B. Latar dan Setting Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kegiatan penelitian memerlukan tempat atau lokasi tertentu sehingga jelas dimana penelitian itu dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, “tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti”. Adapun lokasi penelitian ini yaitu, di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian mencakup serangkaian kegiatan dan alokasi waktu yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2020.

C. Subjek dan Informan Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dimaksud disini adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pelaksanaan penelitian. Maka yang menjadi subjek penelitian ini yaitu aparatur Pemerintah Daerah, Tokoh Adat dan Ulama serta peninggalan sejarah yang terdapat di Kabupaten Kampar.

2. Narasumber (Informan)

Narasumber atau informan merupakan sumber data yang dipilih dan digunakan dalam penelitian kualitatif, karena dapat memberikan informasi berupa kata-kata dan tindakan, dan merupakan sumber data yang utama. Sumber data utama kemudian dicatat melalui catatan tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan atau orang-orang yang dianggap mengetahui dengan baik dan benar tentang masalah yang sedang diteliti. Peneliti juga harus mampu memilih informan yang mempunyai sikap obyektif serta mau dengan sukarela memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh peneliti. Sehingga informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkapkan permasalahan penelitian.

Adapun informan yang akan diwawancarai antara lain :

- a. Aparatur Pemerintah Daerah mulai dari tingkat tertinggi sampai kepada RT dan RW yang berinteraksi langsung dengan masyarakat
- b. Tokoh adat atau ninik mamak atau orang yang didahulukan selangkah di tengah-tengah kehidupan masyarakat adat Kabupaten Kampar
- c. Ulama (Abuya, Ustad atau Kiyai) yang dijadikan tempat untuk bertanya tentang persoalan agama dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kampar
- d. Kepustakaan

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Peneliti dalam hal ini melakukan observasi yang bersifat non partisipatif atau pasrtisipasi pasif yaitu pengamatan yang tidak terlibat secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Lexy J. Moleong mengatakan bahwa: “Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan”.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interviewing*) secara terbuka. Dimana peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam. Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada beberapa informan seperti: pejabat pemerintah atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar.

3. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti melakukan telaah kepustakaan dan *content analysis*. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen tentang administrasi, peraturan-peraturan tertulis pondok, visi-misi, foto-foto bangunan dan kegiatan santri baik kegiatan formal maupun nonformal, buku notulen dalam rapat serta jadwal aktifitas atau rutinitas santri.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman “Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi

data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi” (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 16).

Pendapat lain menyatakan bahwa:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 335).

Berdasarkan pendapat di atas, maka analisis data merupakan rangkaian kegiatan dalam usaha memperoleh kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Adapun empat komponen dalam proses analisis ini terdiri dari pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penjelasan dari empat komponen dalam proses analisis data ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghubungi kepala sekolah untuk memperoleh data yang diperlukan. Selain data yang dikumpulkan, peneliti juga menggali informasi sebagai data pendukung yang dikumpulkan berupa dokumentasi kegiatan-kegiatan sekolah yang pernah dilakukan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan para informan yang meliputi: masyarakat umum untuk menggali informasi apakah data yang disampaikan oleh kepala sekolah ada kesesuaian dengan yang disampaikan dengan narasumber/informan.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari semua jenis informasi yang tertulis lengkap dengan catatan lapangan. Dengan kata lain reduksi data dapat pula diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatannya itu

reduksi data, sajian data, dan penarikan simpula dengan verifikasinya, serta proses pengumpulan data di lapangan.

Reduksi data dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara dari berbagai narasumber yang saling berkaitan. Dengan mengelompokkan hasil wawancara yang saling berkaitan, maka hal ini membuktikan bahwa masing-masing informasi yang diberikan oleh beberapa nara sumber merupakan data yang valid.

3. Penyajian Data

Setelah data mengalami proses reduksi, langkah selanjutnya peneliti menyajikan atau menyiapkan data, penyajian data disusun berdasarkan pokok- pokok atau inti yang terdapat dalam proses reduksi, kemudian dikembangkan menurut kalimat yang sesuai, sehingga lebih mudah dipahami.

Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menyajikan data sebagai suatu informasi yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan. Peneliti menyajikan data melalui uraian singkat yang bersifat naratif atau ringkasan dari data yang telah direduksi untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Sebagaimana disebutkan, penyajian data mempunyai dua tujuan. Pertama, penyajian data memudahkan pembaca dalam memahami data mentah yang tidak beraturan secara cepat dan mudah. Kedua, penyajian data memudahkan analisis data dari data mentah yang belum tersusun rapi dengan menyusunnya dalam bentuk yang lebih teratur sehingga mudah dianalisis. Peneliti memisah-misahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan masing-masing seperti data yang berhubungan dengan kedisiplinan, kejujuran, kerjasama dan tanggungjawab.

Selain penyajian data melalui teks naratif, peneliti juga akan menggunakan matriks atau bagan yang akan mempermudah peneliti untuk membangun hubungan teks yang ada. Dengan menggunakan hal

ini, peneliti akan dimudahkan dalam merancang dan menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padat dan mudah difahami, sehingga peneliti dapat melakukan penyederhanaan dan memudahkan penarikan kesimpulan dari data yang ditemukan.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Verifikasi merupakan aktifitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada catatan lapangan.

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah mengambil kesimpulan berdasarkan sajian data. Dari berbagai informasi yang tersusun dalam sajian data yang disertai dengan penjelasan akan mempermudah dalam memberikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan setelah data disajikan dalam satu kesatuan dari beberapa jenis sumber data, yaitu dari nara sumber, hasil observasi, maupun dari dokumen yang terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Strategi Mewujudkan Kampar Serambi Makkah

Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi keberadaan adat istiadat suatu masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengakuan secara hukum tentang keberadaan adat istiadat atau kearifan lokal suatu daerah. Keberadaannya hingga sekarang diakui sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di tanah air. Saat ini, hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia. Ada beberapa produk hukum yang mengatur perihal adat seperti warisan adat, perkawinan adat dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural tertentu. UUD Negara Republik Indonesia 1945 Dalam Pasal 18B ayat (2) telah dijelaskan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Dan diperkuat oleh UUD 45 pasal 28I ayat 3 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Regulasi yang mengatur tentang eksistensi adat dan masyarakat tradisional tersebut juga diperkuat oleh peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang menetapkan visi dan misi Riau sebagai pusat perekonomian dan budaya melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor 40) juga diperlukan sinergitas dan keikutsertaan pemerintahan daerah dan masyarakat pada umumnya untuk mengembangkan nilai-nilai budaya Melayu Riau sebagai pedoman dalam berperilaku dan bersikap. Kabupaten Kampar termasuk dalam bahagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kerangka adat istiadat dari budaya Melayu Riau. Peraturan Daerah Riau tentang Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor : 1 tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau, dalam BAB VI tentang bentuk dan fungsi lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat serta mengembangkan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu.

Pemerintah daerah Kabupaten Kampar juga telah mengeluarkan Perda tentang masyarakat adat yang berkaitan dengan hak tanah ulayat sebagai tanah adat yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 yaitu pengakuan pemerintah tentang keberadaan tanah ulayat yang diatur oleh aturan adat yang berlaku. Untuk menjaga kelestarian adat istiadat yang ada di Kabupaten Kampar dibutuhkan suatu sinergitas antara pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama. Bentuk sinergitas tersebut diatur dalam lembaran Peraturan Daerah tentang sinergitas pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama dalam pembangunan masyarakat yang lebih maju dan memiliki peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat. Untuk membangun sinergitas tersebut diperlukan satu produk hukum yang mengatur ketentuan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah.

Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri atas elemen-elemen sosial yang terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sistem sosial terdapat individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial. Keseluruhan hubungan sosial tersebut

membentuk struktur sosial dalam kelompok maupun masyarakat yang akhirnya akan menentukan corak masyarakat tersebut. Suatu sistem sosial tidak hanya berupa kumpulan individu. Sistem sosial juga berupa hubungan-hubungan sosial dan sosialisasi yang membentuk nilai-nilai dan adat-istiadat sehingga terjalin kesatuan hidup bersama yang bersifat teratur dan berbentuk secara berkesinambungan.

Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang mayoritas penduduknya adalah suku Melayu dan beragama Islam. Secara sosiologis, masyarakat Kampar sangat dikenal dengan masyarakat yang agamis dan taat menjalankan perintah agama. Sebagai masyarakat yang agamis, Kampar juga dikenal sebagai masyarakat adat yang teguh dalam memegang nilai-nilai tradisi yang diturunkan secara turun temurun. Di samping julukan Bumi Sarimadu Kabupaten Kampar juga terkenal dengan julukan Serambi Makkah di Provinsi Riau, ini disebabkan hampir 100 % masyarakatnya beragama Islam.

Secara kultur masyarakat Melayu Kampar memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan daerah-daerah Melayu lainnya di provinsi Riau. Secara adat istiadat masyarakat Melayu Kampar banyak dipengaruhi oleh adat istiadat Minangkabau dari Sumatera Barat. Pengaruh adat istiadat Minangkabau terhadap adat istiadat Melayu Kampar seperti dalam sistem kekeluargaan dan kekerabatan. Masyarakat Melayu Kampar secara kekerabatan lebih dikenal dengan budaya matrilineal yaitu suatu ketentuan dalam adat masyarakat Kampar yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu, sebagaimana juga berlaku pada adat istiadat Minangkabau. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena daerah Kampar dahulunya termasuk dalam kawasan wilayah kerajaan Pagaruyung. Masyarakat Limokoto dikenal dengan masyarakat adat yakni terdiri dari beberapa suku. Perbedaan suku dalam masyarakat tidaklah menjadi perbedaan status sosial. Masing-masing suku mempunyai hak dan kedudukan yang sama dimasyarakat. Pada dasarnya suku yang ada dalam masyarakat adat Limokoto secara garis besar terdapat lima golongan suku besar, kata lain semua suku yang ada sekarang berawal dari kelima suku tersebut.

Adapun golongan suku yang dimaksud adalah suku Piliang, Pitopang, Domo, Mandailing dan Melayu.

Adat istiadat dan tradisi bagi masyarakat Kampar merupakan bagian dari kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai luhur tinggi bagi masyarakat. Kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup masyarakat yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup. Berkat adat istiadat yang dimiliki dapat melangsungkan kehidupannya, bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan (*Sustainable development*). Dalam masyarakat Kampar keberadaan adat istiadat memiliki peran yang kuat dalam membentuk kepribadian dan jati diri masyarakat. Dengan adanya adat istiadat, masyarakat memiliki pedoman untuk menyelesaikan masalah mereka. Lebih lanjut, pada tulisan Yunus (2013) membahas salah satu tradisi di Kabupaten Kampar yaitu Basiacuong salah satu bentuk penyampaian pikiran, ide dan nasehat dengan cara yang tidak langsung atau melalui gaya bahasa yang enak di dengar dan dalam sastra lisan terdapat dialog antara dua ninik mamak dan mengungkapkan pepatah dan pantun yang mempunyai nilai-nilai dan pemakaian bahasa yang bagus. Lebih lanjut, tradisi ini dilakukan pada acara peminangan dan peresmian pernikahan.

Adat dan agama selalu berjalan beriringan yang tidak bisa dipisahkan. Pepatah adatnya mengatakan agamo mangato, adat memakai, artinya setiap adat istiadat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat Melayu Kampar tidak boleh menyimpang dari norma-norma agama. Islam akan memberikan pijakan dan fungsi kontrol yang jelas mana tradisi yang sesuai dengan ajaran islam dan tradisi yang menyimpang dari ajaran Islam. Tradisi-tradisi yang mengarah kepada dinamisme dan animisme yang dahulunya pernah ada, semenjak masuknya agama Islam tradisi tersebut sudah mulai ditinggalkan masyarakat. Sistem nilai yang bersumber dari ajaran Islam memiliki posisi tertinggi dan dihormati oleh masyarakat Kampar. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan nilai yang diwariskan para leluhur bangsa Indonesia yang sampai saat ini sebetulnya masih ada dan terjaga. Nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat dijumpai pada masyarakat adat. Masyarakat adat yang sampai

hari ini masih ada, tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah masyarakat Kampar.

Bila ditelusuri lebih jauh banyak ditemukan kesesuaian antara adat istiadat dan tradisi lokal masyarakat Kampar dengan islam seperti nilai sopan santun dalam berpakaian dimana setiap perempuan diKampar harus menutup aurat dengan memakai baju kurung bagi perempuan dan baju taluok balango khusus untuk laki-laki. Baju kurung merupakan baju yang menutupi seluruh anggota tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Baju taluok Balango merupakan baju khas Kampar yang dipakai oleh pihak laki-laki yang berbentuk baju koko. Model cara berpakaian tersebut sangat sesuai dengan ajaran islam. Model berpakaian tersebut biasa digunakan dalam acara-acara adat dan acara keagamaan. Dalam hal menghargai dan menghormati tamu, masyarakat Kampar akan memberikan pelayanan yang maksimal dengan tradisi menghidangkan jambau yaitu hidangan khas dari Kabupaten Kampar.

Bentuk tradisi lainnya dalam masyarakat Melayu Kampar adalah memelihara nasab. Dalam tradisi Kampar, nasab atau keturunan merupakan sesuatu yang sangat dijaga dan dipertahankan, karena bagi masyarakat Kampar hubungan darah tidak bisa dihapus akan tetapi harus dijaga dengan baik untuk menjaga hubungan kekeluargaan di masa yang akan datang. Pepatah adat mengatakan “supayo mamak tahu akan kamunkan, kamunkan tahu mamak dan saudagho tahu dunsanak” (Supaya mamak mengena anak kemenakan, anak kemenakan mengeal mamaknya dan saudara lain saling mengenali). Maksudnya adalah supaya keluarga besar dan saudara jauh saling kenal mengenali satu sama yang lainnya. Keutuhan nasab dibingkai dalam persukuan. Dengan adanya persukuan ini, orang Kampar akan terhindar menikah dengan saudaranya sendiri, karena dalam tradisi Melayu Kampar pernikahan satu suku sangat dilarang dan menjadi aib dalam masyarakat.

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan arus globalisasi yang begitu pesat, nilai-nilai agama dan adat istiadat yang selama ini menjadi pegangan dan pedoman bagi masyarakat Melayu Kampar,

cenderung mengalami pergeseran dan perubahan sehingga akan dapat mempengaruhi dan merubah pola perilaku dan jati diri masyarakat Melayu yang selama sangat dikenal dengan masyarakat agamis dan memegang teguh nilai-nilai agama dan adat istiadat. Tradisi-tradisi keagamaan dan adat yang menjadi ikon dari masyarakat Kampar lambat laun mulai ditinggalkan karena dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan peradaban. Globalisasi dan modernisasi telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan masyarakat melalui perkembangan teknologi informasi dan ekonomi sehingga mengakibatkan memudarnya nilai-nilai budaya masyarakat.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri masyarakat Melayu Kampar seperti mulai hilangnya budaya malu, nilai sopan santun dalam keluarga maupun masyarakat, saling tidak menghargai antara ninik mamak dengan anak kemenakan, nilai-nilai gotong royong dan solidaritas yang mulai memudar dan hilang. Dalam hal tradisi yang mulai hilang adalah sistem pernikahan merupakan prosesi yang sangat sakral yang identik dengan nilai-nilai adat istiadat yang sarat dengan pesan-pesan moral juga mulai ditinggalkan. Modernisasi dan globalisasi telah memberikan dampak dalam pembentukan jati diri masyarakat Kampar kepada hal-hal yang pragmatis dan hedonis. Sehingga disinyalir akan dapat mempengaruhi nilai-nilai dan cara pandang dan jati diri masyarakat dalam menghargai budayanya. Untuk mengantisipasi permasalahan ini diharapkan peran pemerintah daerah, tokoh adat dan alim ulama, cerdik pandai untuk duduk bersama bagaimana mengembalikan jati diri masyarakat yang mulai hilang yang jauh dari nilai-nilai agama dan adat istiadat

B. Konsep Tali Bapilin Tigo

Kajian teoritik maupun empirik yang telah di analisa dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik gambaran umum terkait dengan Perda sinergitas pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama dalam membangun masyarakat Kabupaten Kampar, pada ini akan diuraikan lebih jauh tentang konsep tali bapilin tigo.

Tali bapilin tigo dapat diwujudkan dengan adanya sinergitas pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama dalam membangun masyarakat Kabupaten Kampar. Adapun azas dalam tali bapilin tigo adalah: (a) Kerja Sama; (b) Gotong Royong; (c) Persatuan; (d) Transparan; (e) Keahlian.

Tali bapilin tigo tentunya memiliki arah tujuan yang jelas agar Kampar Serambi Makkah dapat terwujud. Tujuan dari tali bapilin tigo adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan kesadaran saling bersinergi atau bekerja sama pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama
2. Mewujudkan profesionalitas dalam bekerja antara pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama
3. Meningkatkan etos kerja yang tinggi dan terarah antara pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama

Lebih lanjut, tali bapilin tigo dapat dilihat dari rumusan berikut yang berasal dari analisa terhadap data-data yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian ini. Dari data-data tersebut, penulis mengemukakan bahwa tali bapilin tigo berbentuk lembaga yang nantinya memiliki fungsi mewujudkan sinergitas antara pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama di Kabupaten Kampar. Secara lebih rinci, lembaga tali bapilin tigo dapat dilihat pada poin-poin berikut:

1. Nama lembaga ini adalah Tali Bapilin Tigo
2. Tali Bapilin Tigo terdiri dari unsur pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama dan/atau cendekiawan
3. Tali Bapilin Tigo berkedudukan di Ibukota Kabupaten Kampar
4. Tali Bapilin Tigo adalah lembaga non struktural.
5. Tali Bapilin Tigo minimal terdiri dari terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang dan sekretaris bidang dengan masing-masing tugas
6. Syarat keanggotaan

Lembaga tali bapilin tigo ini nantinya memiliki kewenangan dan peran dalam upayanya mewujudkan Kampar Serambi Makkah. Berikut penulis paparkan bagaimana kewenangan dan peran lembaga tali bapilin tigo untuk mewujudkan Kampar Serambi Makkah.

a. Kewenangan

1. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan Kampar Serambi Makkah
2. Menyelesaikan persoalan keagamaan
3. Menyelesaikan persoalan adat istiadat
4. Merumuskan program terwujudnya Kampar Serambi Makkah
5. Melakukan pengawasan terhadap program dan implementasi Kampar Serambi Makkah
6. Dalam melaksanakan wewenangnya, Tali Bapilin Tigo bertanggung jawab kepada masyarakat
7. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan aturan perundang-undangan

b. Peran

1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mampu menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang berlandaskan kepada Iman dan Takwa (IMTAK) kepada Allah SWT
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan agamis
3. Meningkatkan infrastruktur dan pemerataan pembangunan agar terciptanya akses bagi kehidupan masyarakat
4. Menciptakan lapangan pekerjaan
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kampar
6. Menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

7. Menjamin terciptanya kedamaian hidup umat beragama baik intern umat beragama, antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah

Selanjutnya peran tokoh adat dalam membangun masyarakat Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Membina anak kemenakan
2. Menyelesaikan konflik atau perkara antar anggota masyarakat adat
3. Mewakili negeri/masyarakat dalam acara adat istiadat
4. Melestarikan nilai-nilai adat atau budaya di masyarakat berupa bertutur kata, berpakaian, kegiatan adat pernikahan, aqiqah, khitan dan penobatan gelar adat.
5. Menjaga dan mengurus harta pusaka, tanah soko dan tanah ulayat agar mensejahterakan anak kemenakan dan masyarakat Kabupaten Kampar
6. Mendampingi/bermitra dengan pemerintah dalam proses pembangunan
7. Menyelamatkan negeri dari ancaman kerusakan moral sehingga terpelihara dan terjaga adat istiadat dan budaya
8. Memberikan contoh tauladan kepada anak kemenakan dan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan adat dan budaya, akhlak mulia serta kepemimpinan
9. Mematuhi dan menjalankan aturan adat yang sudah disepakati bersama dan menjadi hukum yang tidak tertulis di masyarakat

Peran ulama dalam membangun masyarakat Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Melakukan dakwah islamiyah
2. Membina kader ulama
3. Memberikan fatwa, himbauan dan rekomendasi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat
4. Mengkaji dan mengembangkan Islam baik secara individu maupun kelembagaan atau organisasi masa

5. Melindungi agama Islam dan umat Islam dari ancaman langsung maupun tidak langsung seperti dekandensi moral dan kebudayaan barat
6. Menjadi tauladan bagi masyarakat dalam hal akhlak mulia, sopan santun dan kepemimpinan
7. Mendampingi dan bermitra dengan pemerintah dalam proses pembangunan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian dan analisa yang dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Kampar melakukan berbagai upaya konkrit untuk mewujudkan Kampar Serambi Makkah (KSM), agar sebutan tersebut tidak hanya sebagai pemanis ketika berpidato. Adapun strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Kampar dalam mewujudkan KSM adalah dengan menguatkan sinergitas antara pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama. Adanya sinergitas antara pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama diharapkan mampu menjalankan kehidupan masyarakat Kampar yang lebih baik dan mempercepat pembangunan daerah, menghidupkan kembali nilai – nilai budaya masyarakat masa lalu yang agamis serta sesuai dengan keinginan bersama-sama bersinergi menuju masyarakat yang sejahtera
2. Konsep tali bapilin tigo sebagai sebuah tawaran dalam mewujudkan KSM diimplementasikan dengan pembentukan lembaga independen yang tugasnya fokus mengurus sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat dan ulama di Kabupaten Kampar. Lembaga tali bapilin tigo ini nantinya memiliki wewenang dan peran khusus di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Kampar.

B. Saran

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kebijakan yang bertujuan memberikan konstribusi langsung terhadap daerah. Oleh karena itu, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat penelitian ini perlu segera dituangkan ke dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Kabupaten Kampar tentang Sinergitas Pemerintah Daerah, Tokoh Adat Dan Ulama Dalam Membangun Masyarakat Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Hidayatullah, H. (2016). Metode Tahfidz Al-Qur'an di Pondok Pesantren Kabupaten Kampar. *Jurnal Ushuluddin*, 24(1), 91-102.
- Hayati, N. (2014). Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/BUMN dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(4), 3482-3496.
- Kementerian Agama. (2020). *Lembaga Madrasah*. Kampar. Indonesia
- Kementerian Agama. (2020). *Lembaga Pendidikan Al-Qur'an*. Kampar. Indonesia
- Kementerian Agama. (2020). *Pondok Pesantren di Lingkungan Kantor Kementerian Agama*. Kampar. Indonesia
- Nurjamilah, C. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid dalam Perspektif Dakwah Nabi SAW. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 93-119.
- Nurjanah, N., & Ningsih, A. S. (2014). *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat oleh Ninik-mamak Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rahayu, D. P. (2015). Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1), 190-202.
- Simas Kementerian Agama. (2020). *Masjid dan Mushalla Berdasarkan Jenis di Kabupaten*. Kampar. Indonesia
- Suhartono, S. (2013). Kesadaran Moral Kehidupan Bermasyarakat: Suatu Pemikiran Kefilsafatan. *Makassar: Universitas Negeri Makassar, diunduh September*.
- Dahlan, A. A. (1999). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetaka ke II, Ichtiar Baru Van Havoe.
- Wahyu, W. (2011). Masalah dan Usaha Membangun Karakter Bangsa. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 3(2), 168850.

- Yanto, D. (2016). Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup dalam Kehidupan Sehari-Hari. *ITTIHAD*, 14(25).
- Yunus, M. (2013). Tradisi Basiacuong dalam Masyarakat Adat Limo Koto Kampar. *MENARA*, 12(2), 92-114.
- Zabda, S. (2017). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(2), 106-114.

Strategi Kampar Menuju Serambi Makkah Melalui “Tali Bapilin Tigo”

Tim Peneliti :

Dr. Masyhuri, S.Psi., M.Psi
Afriadi Putra, S.Th.I., M. Hum
Mashuri, MA
Dr. H. Johar Arifin, Lc., MA
Muhammad Yasir, M.A

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2020

Visi Misi Pemerintah Kabupaten Kampar Periode 2017-2022



VISI

Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan Masyarakat yang **Religius, Beradat, Berbudaya dan Sejahtera**

MISI VI:

Merperkuat Citra Kampar sebagai **Serambi Mekkah Riau** yang Religius, Beradat, dan Berbudaya Tujuan

1. Memperkuat adat dan budaya lokal sebagai **sumber nilai, karakter, dan penciri kehidupan masyarakat**
2. Meningkatkan **kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat** yang madani
3. Membangun **karakter generasi muda** yang berakhlak, beradat dan berbudaya

Karakter
dan ciri
kehidupan
masyarakat

Kualitas
Kehidupan
Beragama

Karakter
Generasi
Muda

Rumusan Masalah

1

Bagaimana strategi mewujudkan “Kampar Serambi Makkah”?

2

Bagaimana konsep “Tali Bapilin Tigo” dalam mewujudkan **Kampar Serambi Makkah**?

Metode Penelitian

Jenis
Penelitian
Kualitatif

Metode
Pengumpulan
Data

1

Observasi

2

Wawancara

3

Dokumentasi

Konsep TALI BAPILIN TIGO :

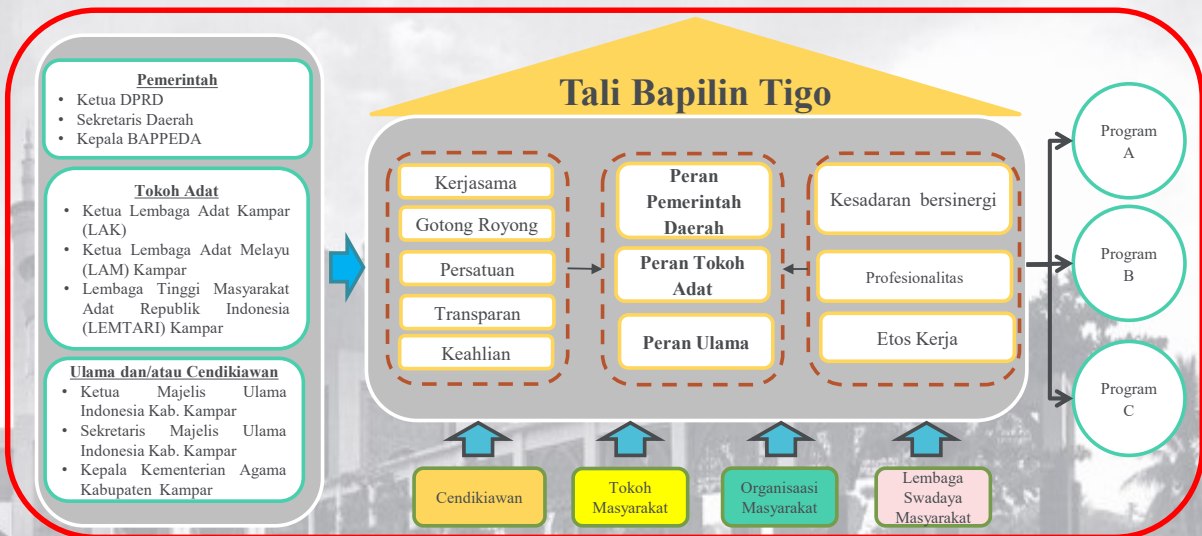
Sinergitas Pemerintah, Tokoh Adat dan Ulama dalam Pembangunan Kampar

Elemen-Elemen	Sub-sub Elemen Kunci
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> o Badan Hukum Lembaga o Elemen-elemen dalam lembaga o Lokasi kedudukan lembaga o Bentuk lembaga o Anggota, tugas, syarat dan mekanisme pemilihan pengurus
Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> o Wewenang Pemerintah Daerah, Tokoh adat dan ulama untuk bersinergi terwujudnya Kampar Serambi Makkah
Peran	<ul style="list-style-type: none"> o Peran Pemerintah Daerah, Tokoh Adat dan Ulama
Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> o Sumber pendanaan o Pertanggungjawaban penggunaan anggaran

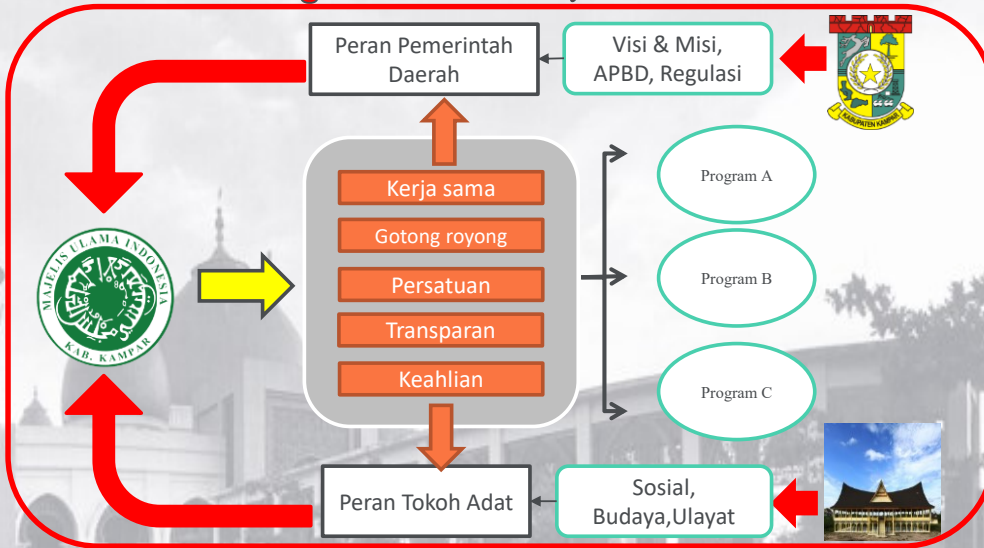
Alternatif 1 Bentuk Kelembagaan

Komisi Pengkajian, Hukum dan Perundangan MUI KAMPAR

TALI BAPILIN TIGO : Sinergitas Pemerintah, Tokoh Adat dan Ulama



Alternatif 2 Bentuk Kelembagaan TALI BAPILIN TIGO : Sinergitas Pemerintah, Tokoh Adat dan Ulama



Rekomendasi Untuk Kampar Serambi Makkah

Kelembagaan

- Perlunya **Pembentukan Lembaga Atau Penguatan Kelembagaan** untuk merealisasikan "**Kampar Serambi Makkah**"

Kebijakan Publik

- Perlunya pengusulan kebijakan publik berupa **RENCANA PERATURAN DAERAH** Untuk implementasi "**Kampar Serambi Makkah**"

Rencana Strategis

- Perlunya **Penyusunan Rencana Strategis** sebagai dasar pemikiran untuk menjalankan Program "**Kampar Serambi Makkah**"

Berjamaah

- Perlunya **dukungan dan keterlibatan** semua elemen masyarakat dalam mewujudkan "**Kampar Serambi Makkah**"





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor: 1318 /R/2020

Tentang

**PENETAPAN PENELITI PENELITIAN MANDIRI KELOMPOK
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2020**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran kegiatan Penelitian Mandiri Kelompok pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020, maka dipandang perlu menetapkan Peneliti Penelitian Mandiri Kelompok;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penunjukan Peneliti Penelitian Mandiri Kelompok pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Susqa menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran 2018.

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/18589/ tanggal 25 Juni 2018 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2018-2022;

11. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN.RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementrian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PENELITI PENELITIAN MANDIRI KELOMPOK PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2020.

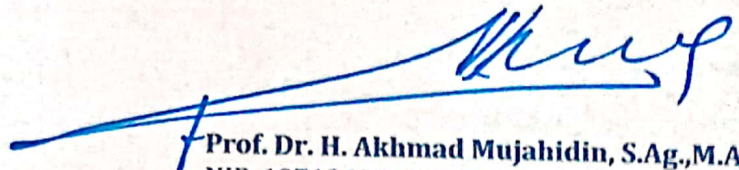
Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Peneliti Penelitian Mandiri Kelompok pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua :

- Kedua** : Peneliti Penelitian Mandiri Kelompok bertugas :
1. Melaksanakan Penelitian;
 2. Mengikuti seminar penelitian;
 3. Mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh LPPM;
 4. Mengumpulkan laporan hasil penelitian;
 5. Melaporkan hasilnya kepada Rektor;
- Ketiga** : Biaya pelaksanaan dibebankan kepada masing-masing peneliti penelitian mandiri kelompok.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku mulai dari tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Oktober 2020
Rektor,


Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197106061997031002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Wakil Rektor di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
10. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 1310 /R/2020
Tanggal : 27 Oktober 2020

**PENETAPAN PENELITI PENELITIAN MANDIRI KELOMPOK
PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2020**

No	Ketua Peneliti	Anggota Peneliti	Fakultas	Judul Penelitian
1	Virna Museliza, SE, M.Si	Rimet, SE., MM.Ak. CA Nanda Suryadi, SE., ME Identity, SE., M.Ak	Fak. Ekonomi dan Ilmu Sosial	Pengaruh Pengambilan Keputusan Konsumen Dalam Membeli Produk Busana Muslimah Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Industri Fashion Busana Muslimah Di Kota Pekanbaru)
2	Dr. Ellya Roza, M.Hum	Mirawati, M.Ag Dra. Hj. Sariah, M.Pd	Fakultas tarbiyah dan keguruan	MENYINGKAP KARAKTER BERAGAMA ORANG MELAYU ABAD KE-19 DALAM MANUSKRIP SYAIR BURUNG KARYA RAJA HASAN BIN RAJA ALI HAJI
3	Yanti Ernalia, MPH	Novitri Syuryadi, M.Si drg. Nur Pelita Sembiring, MKM Tahrir Aulawi, S.Pt., M.Si	Fakultas Pertanian dan Peternakan	KONSUMSI DAN ANALISA NILAI GIZI MINUMAN BERKALORI PADA REMAJA KOTA PEKANBARU DI MASA PANDEMI COVID -19 SEBAGAI USAHA PENCEGAHAN OBESITAS
4	Yasnel, M.Ag	Dr. Sukma Erni, M.Pd Susiba, S.Ag., M.Pd.I	Fakultas tarbiyah dan keguruan	TAREKAT NAQSYABANDIYAH DAN PEMBENTUKAN KARAKTER
5	Dr. Ginda, M.Ag	Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si Yefni, S.Ag., M.Ag	Fakultas Dakwah dan Komunikasi	Adaptasi Pesantren Pada Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pengembangan Budaya Multikulturalisme di Kota Pekanbaru
6	Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum	Mashuri, MA Dr. Johar Arifin, Lc., MA Muhammad Yasir, S.Th.I., MA Masyhuri, S.Psi., M.Si	Fakultas Ushuluddin	Strategi Kabupaten Kampar Menuju Kota Serambi Mekah
7	Neti Afrianis, S.Pd., M. Pd	Ira Mahartika, M.Pd Heppy Okmarisa, S.Pd., M.Pd	Fakultas tarbiyah dan keguruan	PENGEMBANGAN MODUL MATA KULIAH PENDIDIKAN KIMIA DENGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN DARING (DALAM JARINGAN)
8	Ainun Mardiah, SE, MM	Desvi Emti, M.Si	Fakultas Ekonomi dan Sosial	ANALISIS SWOT TERHADAP INDUSTRI PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU
9	Hidayati Nasrah, S.E., M.Acc. Ak	Irdyanti, S.IP., MA Fitri Hidayati, SE., MM Yessi Nesner, SE., MM	Fakultas Ekonomi dan Sosial	IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PEKANBARU
10	Ricca Angreini Munthe, S.Psi., M.A	Dr. Hasbullah, M.Si	Fakultas Psikologi	REPRESENTASI SOSIAL MENGENAI FENOMENA HIJRAH DI PEKANBARU

Rektor,


Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197106061997031002